

BAB V

KESIMPULAN

Kembalinya rezim otoriter baru pasca kudeta militer Mesir tahun 2013 tidak terlepas dari kekuasaan militer Mesir yang telah mengakar di pemerintahan selama puluhan tahun. Selama lebih dari 50 tahun, rezim militer telah menguasai pemerintahan Mesir. Sejak kudeta militer yang dipimpin oleh Gamal Abdel Nasser pada tahun 1952 berhasil menggulingkan kekuasaan Raja Farouk, Mesir berada di bawah kekuasaan Presiden yang otoriter, mulai dari Mohammad Naguib (1952-1954), Gamal Abdel Nasser (1954-1970), Anwar Sadat (1970-1981), hingga Hosni Mubarak (1981-2011). Pada masa pemerintahan Hosni Mubarak, militer Mesir semakin mendominasi pemerintahan dan menempati kedudukan tertinggi sejak dibentuknya SCAF Mesir. Di bawah rezim militer, rakyat Mesir tidak mendapatkan kebebasan dalam kehidupan politik. Pemerintah Mesir juga bersikap represif terhadap kubu oposisi yang melawan kebijakan pemerintah.

Pada tahun 2011, kekuasaan rezim militer Mesir akhirnya mengalami kejatuhan akibat gelombang revolusi *Arab Spring* berhasil melengserkan Hosni Mubarak dari kursi kepresidenan. Pasca revolusi, pemerintahan Mesir selanjutnya dipimpin oleh Presiden Muhammad Mursi yang terpilih secara demokratis pada pemilu presiden tahun 2012. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, presiden Mesir berasal dari kalangan sipil. Muhammad Mursi adalah tokoh Ikhwanul Muslimin,

kubu oposisi yang selama ini menentang pemerintahan militer. Kemenangan Ikhwanul Muslimin dalam pemilu parlemen dan pemilu presiden pada tahun 2012 membuat posisi kalangan militer tersingkir dari pemerintahan.

Berbagai upaya dilakukan SCAF untuk tetap berada di pemerintahan Mesir. Merasa terancam dengan kekuasaan SCAF di legislatif, Presiden Mursi mengeluarkan dekrit yang membatalkan kekuasaan SCAF di tingkat legislatif. Tidak cukup sampai di sini, Presiden Mursi juga mengeluarkan dekrit yang menjadikan dirinya berkuasa tanpa batas. Menginjak satu tahun Pemerintahan Mursi, mulai merebak gerakan protes rakyat menuntut Mursi mundur dari jabatannya. Pemerintahan Mursi dinilai gagal mengatasi permasalahan ekonomi yang semakin memburuk. Peluang ini dimanfaatkan kalangan militer untuk kembali merebut kekuasaan di Mesir. Di bawah komando Abdel Fattah Al Sisi, militer Mesir melakukan kudeta terhadap Presiden Mursi pada 3 Juli 2013. Kudeta yang berhasil menggulingkan pemerintahan Mursi menjadi awal bangkitnya kembali kekuasaan militer di Mesir.

Pasca kudeta, Mesir kemudian dipimpin oleh pemerintahan sementara di bawah dominasi militer Al Sisi. Dalam struktur pemerintahan sementara, Al Sisi menunjuk Ketua Mahkamah Konstitusi, Adly Mansour sebagai presiden sementara dan menempatkan beberapa teknokrat sipil dalam tubuh kabinet. Kabinet pemerintahan sementara ini didominasi oleh kalangan liberal dan teknokrat tanpa melibatkan peran Ikhwanul Muslimin sebagai oposisi. Pada pemerintahan Al Sisi, penundaan pelaksanaan pemilu parlemen semakin mempersempit ruang gerak oposisi dalam kehidupan politik. Sejak berada di bawah kendali Al Sisi, pemerintah Mesir

melakukan demobilisasi massa terhadap kubu oposisi Ikhwanul Muslimin, terlebih ketika pemerintah membubarkan kelompok Ikhwanul Muslimin dan menyatakan kelompok tersebut sebagai organisasi teroris pada tahun 2013. Tidak cukup sampai di sini, pemerintah juga membubarkan FJP (Partai milik Ikhwanul Muslimin) pada Agustus 2014 dan melaksanakan pemilu parlemen pada Oktober 2015 tanpa kehadiran oposisi.

Di sisi lain, kudeta militer terhadap Presiden Mursi telah memicu kemarahan pendukungnya. Selama berbulan-bulan, Ikhwanul Muslimin terus-menerus melakukan demonstrasi mengecam tindakan kudeta yang dilakukan Al Sisi. Stabilitas keamanan di Mesir semakin memburuk, terlebih ketika dominasi militer Al Sisi melakukan tindakan represif terhadap oposisi Ikhwanul Muslimin. Aksi bentrokan yang terjadi antara pendukung Mursi dengan aparat keamanan mengakibatkan lebih dari 900 korban jiwa. Ratusan demonstran ditangkap dan dipenjarakan. Pemerintahan sementara Mesir kemudian memberlakukan Undang-undang Demonstrasi yang semakin membatasi gerak lawan politiknya. Sampai akhirnya, puncak kemarahan Ikhwanul Muslimin terjadi ketika Peradilan Mesir menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap 683 anggota Ikhwanul Muslimin pada April 2014.

Sikap represif yang dilakukan Al Sisi ini semakin menguatkan dugaan rakyat Mesir bahwa tindakan tangan besi Al Sisi menandakan kembalinya rezim militer seperti pada masa pemerintahan otoriter Hosni Mubarak. Kubu oposisi menganggap kemenangan mutlak Al Sisi dalam pemilu presiden tahun 2014 dengan perolehan

suara 98%, hanyalah sebuah rekayasa untuk melegitimasi kekuasaan dominasi militer Al Sisi yang telah berlangsung sejak kudeta militer tahun 2013. Terlebih, pemilu presiden tahun 2014 dilaksanakan tanpa melalui pemilu parlemen sebelumnya.

Dalam pengkajian permasalahan yang diteliti, penulis menemukan fakta dalam membuktikan hipotesis bahwa pemerintahan Mesir di bawah Presiden Abdel Fattah Al Sisi mirip dengan beberapa karakteristik model rezim Otoriter Birokratik (OB), yaitu: Pertama, pemerintahan dipegang oleh militer berkolaborasi dengan teknokrat sipil. Kedua, pemerintahan melakukan demobilisasi massa. Ketiga, pemerintah melakukan tindakan represif dalam mengendalikan oposisi.